

DINAMIKA EKONOMI PERDESAAN: Proses Adopsi Masyarakat Lokal terhadap Komoditas Sawit

Sukapti Wartiharjono

Prodi Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul

E-mail: vkapti89@gmail.com

Abstract

This paper aims at describing the introduction and adoption process of society to the commodity plants of palm plantation supporting economic dynamics of rural society. Field study was conducted with phenomenology method, deep-interview and participated observation to arrange data. Phenomenology approach conducted in this research resulted in finding that palm plantation was introduced and developed by the government through power approach to the society in rural area. Horizontal and vertical conflict in accompanying the entry of the palm plantation did not mean of refusing of farmers to the commodity of palm plantation, but it was an effort to access for better positions. Furthermore, small farmers accessed quickly and with eagerness to the arena of capitalist production mode and left the traditional plantation farm modes.

Key words: rural, farmer, palm plantation, conflict

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menggambarkan proses introduksi dan adopsi masyarakat terhadap tanaman komoditas perkebunan sawit yang mendorong dinamika ekonomi masyarakat perdesaan. Kajian lapangan dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologi, mengandalkan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk menghimpun data. Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam kajian ini mampu menghasilkan temuan bahwa perkebunan sawit dikenalkan dan dikembangkan oleh negara melalui pendekatan kekuasaan terhadap masyarakat dan kawasan perdesaan. Konflik horisontal dan vertikal yang mengiringi masuknya perkebunan sawit bukan berarti penolakan petani atas komoditas perkebunan sawit, melainkan upaya untuk mengakses dengan posisi yang lebih baik. Perkembangan selanjutnya, petani kecil dengan cepat dan bersemangat masuk ke dalam arena mode produksi kapitalis dan meninggalkan mode pertanian perladangan tradisional.

Kata kunci: perdesaan, petani, perkebunan sawit, adopsi, konflik

I. PENDAHULUAN

Jenistanaman pertanian/perkebunan yang dibudidayakan oleh suatu masyarakat dan atau perusahaan perkebunan besar berganti-ganti dari masa ke masa, sesuai dengan arah kebijakan pertanian dan sebagai respon atas dinamika pasar global atau intensifnya komodifikasi. Pada tahun 1911 komoditas sawit mulai dikembangkan pertama kali di Indonesia menyusul

komoditas perdagangan lain seperti tembakau, kopi, karet yang telah dikembangkan sebelumnya. Dalam perkembangannya, sawit menjadi primadona komoditas perkebunan sejak lebih dari dua dekade lalu. Tanaman

sawit dikembangkan secara intensif dan ekspansif di wilayah-wilayah pinggiran di Indonesia, termasuk di Kabupaten Paser Kaltim.

Kabupaten Paser, bagian dari wilayah Kalimantan merupakan *frontier*, yakni sebuah area yang diimajinasikan oleh sebagian orang untuk berputarnya kapital besar yang tiada akhir. De Koninck (Potter, 2011) mengemukakan bahwa Kalimantan merupakan “*ultimate frontier*” dengan karakteristik kepadatan penduduk yang rendah; sumberdaya yang melimpah, dan merupakan “daerah pinggiran dari negara pinggiran”. Karakteristik seperti itulah yang menjadikan Kabupaten

Paser ideal untuk dipilih menjadi target berjalannya kapital, dalam hal ini berupa pengembangan komoditas sawit. Proses teritorialisasi pun dilakukan, yakni berupa pengaturan wilayah dan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan pedalaman Kabupaten Paser yang dilakukan oleh pemerintahan untuk dijadikan area pembukaan perkebunan sawit secara masif. Li (2002) menyebut teritorialisasi sebagai suatu bentuk kekuasaan oleh negara atas masyarakat pedesaan.

Dalam sejarah perkebunan, masuknya perkebunan selalu dibarengi dengan konflik yang melibatkan masyarakat setempat. Kajian yang dilakukan selama ini melihat bahwa hadirnya perkebunan sawit sebagai bentuk kekuatan ekonomi-politik dari luar sering dilawan atau ditolak oleh masyarakat setempat karena merusak atau tidak sesuai dengan kultur tradisional masyarakat setempat. Selain itu, tindakan perlawanan masyarakat lokal dilakukan sebagai reaksi atas proses penyingkiran dan penindasan yang terjadi bersamaan dengan masuknya perkebunan skala besar. Zaiyardam (2016) menunjukkan bahwa perlawanan petani di Indragiri sebagai respon atas kondisi keterpinggiran/ marginalisasi dalam pengembangan sawit yang dilakukan oleh pengusaha dan penguasa. Masyarakat lokal dirugikan secara sosial kultural. Amin (2010) menunjukkan gerakan sosial petani untuk melawan perusahaan perkebunan dengan cara membuat pembingkai narasi tentang terjadinya ketidakadilan dalam hal akses terhadap tanah dan pencitraan petani sebagai korban dari ketidakadilan. Posisi masyarakat (petani) sebagai pihak yang dizalimi hak-haknya, sedangkan perusahaan yang difasilitasi negara melalui pemberian HGU ditempatkan sebagai musuh bersama/ musuh petani. Dalam hubungan antara perusahaan inti dengan petani plasma, kajian Bachriadi (1995) menunjukkan bahwa pola kemitraan sawit menyebabkan petani menjadi obyek/ sasaran dan tergantung pada perusahaan besar. Dikemukakan oleh Bachriadi bahwa bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani plasma tidak secara signifikan mengubah posisi petani yang tetap tidak berdaya dan tersubordinasi.

Tulisan ini akan menggambarkan dinamika ekonomi pedesaan dari sisi yang berseberangan, dimana sebagian masyarakat setempat memiliki orientasi meraih keuntungan dengan menjadi bagian dari mode produksi sawit untuk meraih peningkatan ekonomi. Di antara narasi perlawanan/ penolakan, kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak menolak mode produksi perkebunan sawit, malah sebaliknya berupaya untuk menjadi bagiannya dengan menjadi petani sawit dan meninggalkan sumber pencaharian sebelumnya. Tulisan ini dikawal dengan dua pertanyaan: bagaimana proses introduksi perkebunan sawit di wilayah Kecamatan Long Ikis?. Seperti apa respon masyarakat lokal terhadap mode produksi perkebunan sawit?.

II. METODE

Kajian ini dilakukan di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai wilayah yang dipilih sebagai daerah untuk pengembangan perkebunan sawit pertama kali di Kalimantan Timur. Subyek penelitian adalah petani sawit khususnya yang berasal dari masyarakat lokal atau suku bangsa Paser. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologi. Teknik menghimpun data dengan wawancara dan observasi partisipasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan pekebun yang berasal dari warga lokal yang beretnis Paser, maupun dengan informan yang berasal dari Jawa. Observasi partisipasi dilakukan untuk melihat kehidupan sosial keseharian warga. Penelusuran pustaka, berupa buku/ tulisan ilmiah maupun arsip, juga dilakukan untuk melihat kajian-kajian yang telah dilakukan maupun mendapatkan data sekunder. Data yang dihimpun pada umumnya berupa data kualitatif berupa pendapat/ pandangan dan cerita tentang suatu peristiwa/ kasus. Data kualitatif yang telah dihimpun dianalisis dengan melakukan klasifikasi data berdasar tema dan mereduksi data, menghubungkan-hubungkan antar tema, dan melakukan interpretasi untuk menjelaskan proses pengenalan tanaman sawit dan dinamika ekonomi pedesaan. Perspektif fenomenologi yang digunakan dalam kajian ini membimbing peneliti untuk memperhatikan pada pandangan dan kesadaran subyek yang diteliti atas tindakan atau apa yang dilakukan dalam keseharian hidupnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Long Ikis merupakan bagian dari Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang terletak di bagian paling Selatan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian desa-desa Kecamatan Long Ikis berada di daerah pesisir, dan sebagian desa yang lain berada di wilayah daratan-pedalaman. Wilayah pedesaan-pedalaman di Kecamatan Long Ikis dianggap cocok untuk pengembangan perkebunan sawit.

Dilihat dari komposisi kependudukan, masyarakat di Kecamatan Long Ikis bersifat heterogen berdasar suku bangsa. Penduduk Long Ikis terdiri dari suku bangsa Jawa, Paser, Banjar, Bugis, Sunda, Flores, Madura, Batak, Toraja, Minahasa, dan lain-lain. Jumlah penduduk yang berasal dari suku bangsa di luar suku bangsa-suku bangsa asli Kalimantan lebih banyak dari jumlah penduduk yang berasal dari suku bangsa asli. Karakter kependudukan tersebut bisa dijelaskan oleh latar historis terbentuknya desa-desa yakni sebagai daerah tujuan transmigrasi dan daerah pengembangan perkebunan. Seperti pada karakter wilayah-wilayah pengembangan perkebunan di berbagai daerah, pengembangan perkebunan dibarengi dengan perkembangan

kependudukan akibat didatangkannya buruh/ tenaga kerja perkebunan maupun migran spontan yang mengadu keberuntungan pada perkebunan.

Sebelum maraknya sawit, mata pencaharian masyarakat suku bangsa Paser dan suku bangsa-suku bangsa asli Kalimantan pada umumnya adalah peladang berpindah. Mereka menanam dan mengelola berbagai tanaman pangan maupun tanaman perkebunan secara tradisional. Perdagangan hasil hutan dan tanaman perkebunan berguna untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai, sedangkan tanaman pangan terutama padi diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga sendiri. Keterlibatan masyarakat lokal Kalimantan menjadi pemasok dalam perdagangan komoditas hasil hutan telah berlangsung sejak lama (Cleary, 1996), sehingga kontak dengan pasar global bukan hal baru atau asing bagi masyarakat lokal di Kalimantan.

Proses Introduksi Sawit: Berlakunya Kekuasaan.

Proses introduksi tanaman sawit menunjukkan berlakunya kekuasaan pemerintah atas masyarakat melalui kombinasi berbagai siasat, dari persuasi hingga paksaan. Dalam perkembangannya di Indonesia, kelapa sawit telah dibudidayakan secara komersial di wilayah Sumatra Timur sejak tahun 1911. Luas perkebunan tersebut mencapai 5.123 hektar, dan pada tahun 1919 Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor kelapa sawit sebanyak 576 ton ke Eropa, lalu disusul dengan ekspor minyak inti sawit pada tahun 1923 sebesar 850 ton (Fachrizal, 2014). Perkebunan sawit oleh perusahaan besar berkembang pesat. Budidaya sawit dikembangkan seiring gelombang kapitalisasi dan modernisasi yang dipandu oleh pemerintah dari masa kolonial hingga masa reformasi saat ini.

Ekspansi sawit ke wilayah Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser berlangsung secara massif pada pemerintahan Orde Baru, yakni dimulai pada tahun 1980an. Pada era ini, kerangka budidaya perkebunan sawit sudah dikembangkan dalam bentuk perkebunan kecil/ rakyat di samping pengembangan perkebunan oleh perusahaan besar. Tidak seperti tanaman perkebunan lain terutama karet yang sejak awal dibudidayakan oleh rakyat kecil, perkebunan sawit pada awalnya hanya dapat dilakukan/ dibudidayakan oleh perusahaan besar negara maupun swasta atas pemberian konsesi lahan dari pemerintah. Baru pada tahun 1979 mulai dikembangkan perkebunan sawit rakyat di wilayah Sumatra dengan luas 3.125 Ha dengan produksi 760 ton (Dirjenbun, 2015). Sejak saat itu, perkebunan sawit rakyat/ kecil berkembang pesat beriring dengan perkembangan perkebunan perusahaan bermodal besar. Perkebunan sawit rakyat juga dibuka/ dikembangkan di Kalimantan yang telah dirintis pada tahun 1980 melalui pola perkebunan inti rakyat.

Menurut pemerintah, pembangunan perkebunan sawit rakyat di berbagai pelosok perdesaan/ pedalaman dilakukan dengan tujuan utama untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat kecil di perdesaan, sekaligus mengembangkan wilayah perdesaan/ pedalaman agar tidak tertinggal dari daerah lain. Keterlibatan masyarakat dalam budidaya sawit dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Pembukaan perkebunan di wilayah perdalaman dan terisolir juga dipercaya dapat membuka wilayah tertinggal dan terisolir menjadi lebih terbuka dan maju. Pemerintah memberikan janji dan harapan akan kemakmuran melalui komoditas sawit. Tentu, memberikan jalan bagi berputarnya modal para investor besar dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tujuan tersamar lain di balik proyek-proyek perkebunan sawit rakyat. Investor diberikan dukungan, bantuan dan kesempatan yang sangat besar untuk mengakumulasi modal dengan mengeksploitasi kawasan perdesaan. Sebelum maraknya komoditas sawit, investor telah mengeksploitasi komoditas perdagangan kayu sekitar tahun 1960-1970an yang dikenal dengan banjir kap di wilayah Kalimantan Timur.

Berbagai cara digunakan oleh pemerintah untuk mengintroduksi sekaligus memaksakan mode produksi perkebunan sawit kepada rakyat kecil. Pemerintah tidak mengakui perladangan berpindah sebagai mode produksi masyarakat lokal yang arif/ sesuai dengan lingkungan merupakan siasat untuk melemahkan masyarakat lokal. Mode produksi perladangan berpindah dinarasikan sebagai mode produksi pertanian yang merusak lingkungan/ hutan, pemborosan lahan/ tidak efisien, produktivitas rendah, dan sebagai simbol dari kemiskinan dan keterbelakangan. Perladangan berpindah harus dihentikan atau tidak layak dipertahankan karena dianggap dilakukan dengan cara-cara yang merusak alam/ hutan serta dari sisi ekonomi tidak menjanjikan. Pemberian dan reproduksi stereotipe negative kepada para peladang berpindah sebagai perambah/ perusak hutan dan sebagai pelaku pembakaran hutan merupakan siasat politik yang sengaja dilakukan pemerintah untuk mengalahkan peladang.

Upaya persuasi juga dilakukan dengan cara menyampaikan rasionalitas program agar masyarakat menerima dan memahami maksud dan tujuan pemerintah. Aparat pemerintah di tingkat desa dan pemimpin kampung merupakan kepanjangan kekuasaan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat sasaran. Aparat dan tokoh masyarakat telah dipengaruhi dengan cara diberikan insentif-insentif/ keuntungan pribadi agar mereka bersedia membantu program pembangunan sawit. Masyarakat sasaran tidak diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengajukan pendapat dan mengemukakan kepentingannya. Sosialisasi dan persuasi dilakukan sedemikian rupa untuk mendapatkan

penerimaan dan kepatuhan masyarakat sasaran pada gilirannya masyarakat akan mengurangi resiko perlawanan yang merugikan.

Demi meyakinkan warga setempat akan kemakmuran melalui komoditas sawit, beberapa tokoh warga Paser diajak untuk melakukan studi banding di wilayah Sumatra yang terlebih dahulu hidup bergantung dari tanaman sawit. Beberapa tokoh warga Paser diajak melihat perkebunan dan pabrik pengolahan minyak sawit milik perusahaan negara di Sumatra. Hal yang tidak kalah penting, mereka diajak berkeliling melihat lingkungan perumahan yang tampak rapi dan sejahtera. Kunjungan ke kawasan perkebunan di Sumatra bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa perkebunan sawit mampu meningkatkan kehidupan warga/ petani. Upaya melakukan kunjungan ke Sumatra dianggap sangat strategis untuk meyakinkan warga Paser yang belum memiliki gambaran sama sekali tentang tanaman sawit. Pemutaran film pengembangan perkebunan sawit dan peningkatan kemakmuran sawit juga dilakukan. Strategi berkunjung langsung ke kawasan perkebunan dianggap dapat menunjukkan bukti konkret akan keberhasilan sawit dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti pada teknik studi banding pada umumnya, gambaran-gambaran yang baik saja yang ditunjukkan kepada peserta/ pengunjung. Apa yang dipertontonkan telah diatur sedemikian rupa agar memberikan gambaran/ citra bagus.

Pada awal pembukaan perkebunan yang dipaksakan melalui kebijakan negara, banyak warga yang menolak sawit dan mempertahankan tanaman karet. Pertentangan dan konflik yang terjadi karena kegamangan masyarakat lokal menghadapi kuatnya tekanan penguasa dan begitu cepatnya perubahan alam/ hutan yang akan dikonversi menjadi areal perkebunan. Pertanyaannya adalah apakah konflik dan pertentangan yang muncul terkait perkebunan sawit menunjukkan penolakan masyarakat terhadap komoditas sawit?. Ditilik dari konflik/ pertentangan yang muncul menegaskan bahwa konflik yang terjadi merupakan penolakan atau respon atas cara-cara yang digunakan oleh pemerintah yang tidak menghargai hak-hak masyarakat adat atas lahan.

Konflik yang pernah terjadi selama pengenalan dan pelaksanaan pengembangan sawit pada umumnya terkait dengan sumber daya lahan yang dipergunakan untuk alokasi perkebunan. Konflik tersembunyi antar warga transmigran pendatang dengan warga lokal terkait dengan redistribusi lahan pertanian bagi warga transmigran yang semula merupakan milik masyarakat lokal. Ada unsur kecemburuan antar etnis karena perlakuan tidak adil dari pemerintah. Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan besar terkait dengan pengambilalihan lahan untuk perkebunan

dengan varian kasus yang berbeda. Tanah masyarakat lokal diklaim sebagai tanah negara kemudian diberikan kepada pemodal dengan semena-mena.

Seperti dikemukakan Marti (2008:29) banyak wilayah perdesaan di Indonesia yang bukan merupakan wilayah hutan tak berpenghuni seperti yang dibayangkan pemerintah, bukan pula lahan yang tidak diklaim oleh kelompok masyarakat tertentu. Wilayah-wilayah tersebut merupakan lansekap hutan antropogenik (diciptakan manusia) atau dimodifikasi oleh manusia, biasanya terdiri dari: hutan primer dan sekunder, ladang untuk tanaman tahunan yang dirubah menjadi sistem agroforestri yang dirotasi selama lebih dari 30 tahun (termasuk hutan karet yang ditanam oleh masyarakat dan tanaman lain); kebun buah-buahan; daerah yang dilindungi masyarakat karena memiliki nilai kultural tertentu (termasuk kuburan di hutan); serta rumah dan pekarangan.

Perkebunan sawit dan berkembangnya konflik sosial telah menjadi kenyataan dan tidak bisa diragukan lagi bukti-bukti empirisnya. Seperti diungkap dari berbagai kajian bahwa konflik horisontal maupun vertikal selalu terjadi dimana ekspansi perkebunan sawit dilakukan. Menurut Marti (2008) terdapat pola yang sama dari sebagian besar konflik vertikal yang terjadi di berbagai tempat. *Pertama*, konflik terjadi di lahan yang telah lama diklaim dan ditanami oleh masyarakat serta lahan dimana masyarakat memanen produk hutan non kayu dan lahan-lahan tersebut kemudian dialokasikan pada perusahaan tanpa konsultasi dengan masyarakat. Masyarakat protes kepada perusahaan dan pemerintah lokal. Perusahaan seringkali berjanji akan membayar kompensasi lahan, memberi kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam skema perkebunan serta godaan-godaan lainnya. *Kedua*, perusahaan tidak menepati janjinya dan masyarakat kembali melancarkan protes kepada pemerintah lokal dan pegawai perusahaan. *Ketiga*, perusahaan tidak melakukan apapun untuk memenuhi permintaan masyarakat lokal dan masyarakat lokal mengambil berbagai tindakan, misalnya menghancurkan atau menyita peralatan dan kendaraan perusahaan, menduduki markas perusahaan, menghadang para pegawai perusahaan yang ingin bekerja dan lain sebagainya. *Keempat*, perusahaan mengangkat anggota polisi dan militer untuk membalas dendam dan semakin banyak kekerasan yang terjadi”.

Adopsi Komoditas Sawit: Memasuki Pusaran Kapitalis.

Serangkaian fakta empiris pada saat pengenalan dan pelaksanaan pembudidayaan sawit berkisar tahun 1980-1990 menegaskan kuatnya peran kekuasaan negara dengan seluruh perangkatnya dalam memaksa

masyarakat lokal untuk mengadopsi tanaman sawit sekaligus meninggalkan cara produksi perladangan berpindah yang dianggap primitif. Namun proses pengenalan dan penyebaran tanaman perkebunan sawit menggunakan kekuasaan negara tidak berlangsung lama, atau setidaknya semakin lama semakin berkurang/tidak terlalu nampak. Sebaliknya, terjadi perubahan orientasi masyarakat dimana masyarakat atau petani lokal sangat berminat untuk mengembangkan usaha perkebunan sawit rakyat/ kecil dengan inisiatif sendiri atau mengikuti gelombang pasar yang menarik petani kecil masuk ke dalamnya. Indikasi dari fenomena menguatnya gairah petani pada komoditas sawit telah terjadi sekitar tahun 1990an dan semakin meningkat hingga saat ini.

Tidak membutuhkan waktu lama komoditas sawit telah menjadi primadona komoditas perkebunan bagi masyarakat lokal. Tanaman sawit menjadi salah satu tanaman *boomcrop* yakni komoditas pertanian yang mampu menciptakan lonjakan produksi dan dalam waktu yang relative cepat dapat mengkonversi luasan lahan yang besar menjadi hamparan agroekosistem sejenis atau hampir sejenis (Hall, 2011; Santoso, 2015). Fenomena *booming* sawit bahkan terjadi di wilayah negara-negara Asia Tenggara yang pada umumnya merupakan produsen sawit. Lonjakan pembukaan perkebunan sawit rakyat meningkat pesat dan hampir tidak dapat ditekan atau dikendalikan oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat lokal pada komoditas perkebunan sawit sebagai sumber penghidupan yang menjanjikan sangat kuat.

Beberapa indikasi yang menunjukkan bergesernya minat masyarakat lokal pada sawit tampak nyata. *Pertama*, masyarakat lokal dengan inisiatif sendiri berangsur-angsur membuka perkebunan sawit rakyat secara mandiri atau swadaya dengan cara membuka hutan yang masih tersisa atau mengkonversi ladang atau kebun milik mereka. Ukuran luas kebun yang dibuka/dikonversi oleh rumah tangga petani kecil bervariasi tergantung kemampuan finansial dan tenaga kerja yang dimiliki. Sebagian petani kaya yang berorientasi bisnis berani membuka kebun sawit hingga puluhan hektar, sedangkan petani kecil bermodal kecil hanya membuka kebun sekitar satu atau dua hektar. Mereka seperti haus akan tanah demi memperluas kebun sawit. Gairah untuk membuka hutan sepertinya sulit dikendalikan melalui aturan pemerintah.

Selain itu, masyarakat menjadi lebih dekat dan berani dengan lembaga perbankan yang dapat memberikan kredit yang berguna bagi usaha perkebunan. Diperlukan modal uang dan tenaga kerja yang besar untuk pembangunan perkebunan sawit. Kebutuhan modal dan tenaga kerja paling besar diperlukan pada

tahap investasi atau pembukaan kebun. Misalnya biaya untuk upah tenaga kerja yang bekerja menyiapkan dan membersihkan lahan hingga lahan siap ditanami, serta biaya untuk pembelian bibit dan pembelian pupuk. Kebutuhan akan tenaga kerja paling besar diperlukan dalam pembukaan dan pembersihan lahan hingga tahap penanaman. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan juga membutuhkan tenaga kerja dan waktu yang tidak sedikit.

Semakin banyak warga lokal mengkonversi kebun, ladang, dan hutan menjadi perkebunan sawit menegaskan adanya gairah untuk masuk dalam sirkuit kapitalis. Petani kaya maupun petani miskin bagai berlomba-lomba beralih ke komoditas sawit. Tanaman karet yang masih dimiliki oleh sebagian masyarakat lokal dikonversi menjadi perkebunan sawit dengan inisiatif sendiri. Kebun rotan juga diubah menjadi kebun sawit. Demikian pula dengan hampir semua lahan pangan para transmigran yang seharusnya dipergunakan untuk menanam tanaman pangan dikonversi menjadi kebun sawit oleh petani transmigran lokal maupun transmigran pendatang dari Jawa. Bagi petani transmigran, menanam tanaman pangan tidak memberi sumbangan pendapatan yang cukup, apalagi lahan pangan yang mereka miliki hanya 0,25 ha. Pemeliharaan tanaman pangan juga dirasa memerlukan waktu yang lebih banyak dan hasilnya sangat minim. Pada umumnya masyarakat desa membeli sayur mayur di pasar untuk konsumsi sehari-hari, karena mereka tidak memproduksi sendiri.

Kedua, warga lokal mendesak pemerintah daerah untuk membantu memberikan sarana produksi untuk pembangunan kebun sawit bagi masyarakat lokal yang tidak terakomodir dalam program pola inti rakyat transmigrasi. Mereka tertarik mengembangkan sawit setelah melihat keberhasilan dan peningkatan ekonomi petani pola PIR transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Paser merespon secara positif tuntutan warga lokal dengan memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk bagi petani lokal melalui sistem kredit untuk meringankan biaya investasi kebun. Petani sawit diwajibkan membayar kredit sarana produksi yang telah diperoleh kepada pemerintah ketika tanaman sawit telah berbuah. Petani sawit dengan bantuan saprodi dari pemerintah daerah ini kemudian disebut petani PIR lokal, untuk membedakan petani sawit dalam pola PIR-transmigrasi. Selain itu banyak pula petani yang membuka kebun sawit dengan biaya sendiri termasuk mencari bibit dan pupuk sendiri.

Dukungan pemerintah kabupaten kota maupun provinsi Kalimantan Timur atas pengembangan sawit untuk perkebunan besar maupun kecil sangat besar karena dalam MP3EI 2011-2025, koridor Kalimantan ditetapkan sebagai produsen pengembangan komoditas

sawit. Hal ini terkait dengan ambisi pemerintah untuk mempertahankan predikat sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Prioritas pengembangan sawit tidak terlepas pula dari meningkatnya permintaan pasar dunia akan minyak nabati terutama minyak sawit. Permintaan akan minyak sawit mengungguli minyak nabati lain, misalnya minyak kedelai.

Ketiga, macetnya regenerasi peladang. Warga masyarakat lokal yang berusia muda tidak lagi berminat menjadi peladang, bahkan sebagian besar kaum muda etnis Paser tidak berminat masuk di bidang pertanian. Bagi orang muda yang masih berminat terjun di bidang pertanian lebih memilih menjadi pekebun sawit daripada menjadi peladang atau petani komoditas tanaman pangan. Seperti yang disampaikan informan bahwa kaum muda tidak tertarik berladang padi yang dianggap tidak menguntungkan. "Perhitungan ekonominya tidak masuk kalau berladang padi. Hanya orang tua seusia bapak saya saja yang masih mau berladang. Itupun hanya dilakukan untuk kesenangan" (informan 41 tahun). Tinggal sebagian kecil orang berusia lanjut yang masih berladang padi karena telah terbiasa melakukannya.

Menurut pandangan petani sawit, tanaman sawit memiliki keunggulan daripada tanaman lain. Dari sisi ekonomi tanaman sawit mampu memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas tanaman lainnya, terutama dibandingkan dengan berladang padi. Tanaman pangan pokok padi ditanam hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga. Kebutuhan akan uang tunai tidak dapat dipenuhi dengan hasil bertani tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Dari sisi alokasi waktu untuk penanaman dan pemeliharaan, tanaman sawit juga lebih unggul dari tanaman lain seperti tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman perkebunan lain terutama karet. Dibandingkan dengan karet, tanaman sawit hanya membutuhkan sedikit waktu untuk pemeliharaan, sedangkan tanaman karet memerlukan waktu pemeliharaan yang sangat banyak. Aktivitas pemeliharaan dan pengambilan hasil komoditas karet harus dilakukan setiap hari, sebaliknya tanaman sawit tidak perlu dirawat dalam satuan waktu harian. Ketika sawit telah memasuki masa tanaman menghasilkan, perawatan hanya dilakukan beberapa bulan sekali dengan melakukan pemberishan rumput dan gulma. Pemanenan dapat dilakukan sekitar sebulan sekali. Pemupukan paling banyak hanya dilakukan tiga kali selama satu tahun. Peralihan dari karet ke komoditas sawit ini cukup menarik karena masyarakat lokal Kalimantan sudah sejak lama bergantung pada karet.

Keunggulan lain dari tanaman sawit adalah tahan dari serangan penyakit dan bencana kebakaran. Selama menekuni budidaya sawit dalam satu siklus tanam

berkisar 20-25 tahun, petani sawit tidak pernah menghadapi serangan penyakit pada tanaman sawit. Hal ini berbeda dengan tanaman pangan dan hortikultura yang rentan terhadap serangan penyakit maupun hama. Seorang informan (56 tahun), petani sawit yang juga membudidayakan tanaman cabai mengaku menderita kerugian besar karena cabainya tiba-tiba diserang penyakit dan atas saran seorang ahli pertanian cabai itu harus dimusnahkan. Pengalaman itu menguatkan kepercayaannya hanya pada komoditas sawit. Dari sisi bahaya kebakaran, tanaman sawit juga lebih unggul dari tanaman lain. Tanaman sawit tidak akan mudah mati bila hanya terbakar dalam waktu sebentar, sedangkan tanaman lain termasuk tanaman karet akan mati. Keunggulan karakteristik tanaman sawit tersebut di atas cukup menghindarkan/ mengurasi petani dari resiko kerugian.

Cepatnya proses penerimaan masyarakat pada komoditas sawit dipengaruhi oleh kuatnya gelombang pasar yang direperentasikan oleh hadirnya perusahaan-perusahaan perkebunan besar dan pabrik pengolahan minyak sawit di wilayah perdesaan. Masyarakat melihat peluang yang dapat memberikan keuntungan ekonomi besar bagi mereka, dan dengan tangkas menangkap peluang itu. Mereka berlomba-lomba membuka kebun sawit untuk mensuplai kebutuhan bahan mentah bagi pabrik-pabrik pengolah sawit yang siap menerima buah sawit. Pada titik tertentu, perusahaan besar dapat dikatakan sebagai *partner* petani sawit rakyat yang mendorong untuk petani untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang tersedia demi sama-sama mendapat keuntungan ekonomi. Masyarakat lokal melupakan bahwa sebelumnya leluhur mereka sangat menghargai lingkungan alam dan hutan demi penghargaan pada kehidupan. Isu kerusakan lingkungan tidak membuat masyarakat merasa prihatin dan bergeming untuk menahan perilaku ekspansif ke upaya mengkonversi hutan menjadi kebun.

Lembaga perbankan sebagai sarana penyedia finansial bagi kelancaran kebutuhan modal usaha juga menjadi penunjang bagi gairah usaha perkebunan petani kecil. Pihak perbankan secara proaktif memperkenalkan dan menawarkan kredit kepada petani kecil dengan berbagai tawaran. Kebijakan pemerintah juga mendukung pertemuan antara lembaga perbankan dengan petani kecil melalui program kredit lunak untuk petani kecil. Petani sawit dan masyarakat perdesaan pada umumnya terbiasa mengambil kredit dari bank baik untuk kepentingan produktif, dan tidak jarang untuk kepentingan konsumtif.

IV. SIMPULAN

Pengenalan dan perluasan perkebunan sawit di wilayah

perdesaan merupakan pelaksanaan program pemerintah untuk mengembangkan masyarakat perdesaan. Program pengembangan sawit bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat lokal, pengembangan wilayah perdesaan, sekaligus menghentikan sistem perladangan berpindah. Pada tataran operasional proses introduksi menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat lokal dengan pendatang terkait penyediaan lahan untuk perkebunan. Konflik yang terjadi dalam pengembangan komoditas sawit tidak dapat diartikan sebagai penolakan atas komoditas sawit, melainkan bentuk penolakan terhadap cara-cara pengambilalihan sumber daya lahan milik masyarakat lokal.

Kajian ini menemukan bahwa masyarakat lokal mengadopsi tanaman sawit dengan cepat dan bersemangat. Hal ini menegaskan keinginan masyarakat lokal untuk masuk dalam putaran produksi kapitalis. Cara-cara yang dilakukan oleh petani kecil untuk pengembangan sawit tidak berbeda dengan cara yang dilakukan oleh kapitalis perusahaan besar, terutama dalam mengeksploitasi tanah/ hutan. Perluasan kebun oleh petani kecil hanya diarahkan untuk meraih keuntungan ekonomi. Petani sawit kecil tidak lagi tertarik membudidayakan tanaman-tanaman yang tidak memberikan keuntungan yang tinggi.

Dinamika ekonomi masyarakat desa tersebut bukan merupakan hal positif untuk lingkungan alam yang terus dieksploitasi. Demikian juga mengkhawatirkan untuk keberlangsungan ketahanan pangan karena masyarakat perdesaan tidak lagi membudidayakan tanaman pangan dan hortikultura. Petani kecil di perdesaan bergantung hanya pada satu komoditas pasar global yang rapuh.

Daftar Pustaka

- Amin, Suryani. 2010. Mobilisasi dan Perubahan Sosial di Wilayah Konflik Agraria: Studi Kasus Pasedururan Petani Penggarap PT. Tratak (P4T). *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 15 No.1: 85-125
- Bachjriadi, Dianto. 1995. Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital : Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan pola Contract Farming. Bandung: Akatiga.
- Cleary, M.C. 1996. Indigenous Trade and European Economic Intervention in North-West Borneo c.1860-1930. *Modern Asian Studies* Vol.30, No.2 (May): 301-324.
- Dirjenbun. 2015. Statistik Perkebunan Indonesia, Kelapa Sawit 2013-2015. Jakarta.
- Hall, Derek., P.Hirsch., Tania Li. 2011. Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore: NUS Press.
- Li, Tania Muray. 2002. Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis terhadap Transformasi Daerah Pedalaman dalam buku Tania Murai Li (ed)Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marti, S. 2008. Hilangnya Tempat Berpijak, Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Friends of the Earth, LifeMosaic dan Sawit Watch.
- Potter, Lesley. 2011. Agrarian Transitions in Kalimantan: Characteristics, Limitations and Accomodations dalam buku R. de Koninck, S.Bernard, J.F Bissonnate (ed) Borneo Transformed, Agricultural Expansion on the Southeast Asian Frontier. Singapore: NUS Press.
- Santoso, Hery. 2015. "Bertani itu Berjudi: Ketika Mekanisme Pasar Bias Spekulasi". Disertasi. Yogyakarta: UGM.
- Zaiyardam, Zubir. 2016 "Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978-2010". Disertasi. Yogyakarta: UGM